

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG  
PASCA KEBAKARAN PASAR DARI SISI PEDAGANG DAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus: Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung  
Barat)**

**Draft Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Oleh :

Annisa Anindia Cahya Kamila

124030051



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG  
PASCA KEBAKARAN PASAR DARI SISI PEDAGANG DAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus: Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung  
Barat)**

**Draft Skripsi**

Untuk memenuhi salah satu syarat sidang skripsi

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Ekonomi Pembangunan

Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan

Disusun Oleh :

Annisa Anindia Cahya Kamila

124030051

Bandung, September 2016

Mengetahui,

Dosen Pembimbing

**Endang Rostiana, SE., MT**

**NIPY. 151 102 47**

Dekan FE UNPAS

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

**Dr. Atang Hermawan, SE., MsiE., Ak.**

**NIPY. 151 100 58**

**Dr. H. Tete Saepudin, SE. Msi.**

**NIPY.151 101 92**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan relokasi pedagang pasca kebakaran dari sisi pedagang dan masyarakat dilihat dari sisi pendapatan para pedagang dan persepsi masyarakat mengenai kepuasan relokasi pasar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Metode deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dalam menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana dampak kebijakan relokasi pasar yang dirasakan oleh para pedagang Pasar Panorama Lembang dan Masyarakat sekitar, apakah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah setempat memberikan dampak yang baik dan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan atau belum serta bagaimana persepsi masyarakat mengenai relokasi pasar. Metode analisis kuantitatif menggunakan uji beda bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapatan para pedagang Pasar Panorama Lembang sebelum dan sesudah relokasi Pasar pasca kebakaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya relokasi pasar sementara ini berdampak bagi pedagang dan masyarakat sekitar. Pendapatan para pedagang mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan dengan sebelum relokasi. Pedagang dan masyarakat pun merasa kurang puas dengan kondisi pasar di lokasi saat ini.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyediakan lahan sementara bagi para pedagang lama maupun pedagang baru untuk tetap dapat berdagang. Pemerintah sebagai fasilitator untuk lelang proyek pasar yang kemudian nantinya dikelola oleh pihak swasta. Pemerintah telah menjalankan proses pembangunan pasar yang baru yang telah berjalan sekitar 10% dan mereka memastikan bahwa pasar tersebut akan siap ditempati dalam waktu 3 tahun kedepan dengan diprioritaskannya pedagang lama dengan dilengkapi surat-surat izin kepemilikan kios sebelumnya dan memberikan kemudahan dalam pembayaran tebus jongko baru.

*Kata Kunci : Relokasi, Pendapatan, Kebijakan Pemerintah*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang belum lama terbentuk di Jawa Barat. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 2 Januari 2007. Berdasarkan data, luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu 1.305,77 Km<sup>2</sup>. Cakupan wilayah Kabupaten Bandung Barat meliputi 15 Kecamatan yang terdiri dari: Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas dan Rongga.

Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh sektor industri. Posisi kedua yaitu Perdagangan/Hotel/Restoran, selanjutnya yaitu sektor pertanian, jasa-jasa, listrik/gas dan air, pengangkutan/telekomunikasi, pertambangan dan penggalian, bangunan, keuangan/persewaan/jasa perusahaan. Bagaimana gambaran perekonomian di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat dari gambaran perkembangan nilai PDRB masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2013 – 2015 (Milyar Rupiah)**

Sektor	Tahun ( Milyar Rupiah )		
	2013	2014	2015
<b>I. Primer</b>	<b>1.107</b>	<b>1.143</b>	<b>1.139</b>
1. Pertanian	1.059	1.094	1.089
2. Pertambangan dan Penggalian	48	49	49
<b>II. Sekunder</b>	<b>5.054</b>	<b>5.334</b>	<b>5.614</b>
3. Industri	4.098	4.317	4.549
4. Listrik, Gas dan Air	703	743	770
5. Bangunan	253	274	294
<b>III. Tersier</b>	<b>3.391</b>	<b>3.621</b>	<b>3.872</b>
6. Perdagangan/Hotel/Restoran	2.015	2.167	2.332
7. Pengangkutan/Telekomunikasi	514	541	571
8. Keuangan/Persewaan/jasa Perusahaan	278	296	314
9. Jasa-jasa	583	617	656
<b>PDRB</b>	<b>9.552</b>	<b>10.097</b>	<b>10.625</b>

Sumber : Bappeda Kabupaten Bandung Barat

Tabel diatas menunjukkan bahwa sektor industri yang merupakan penyumbang kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Bandung Barat dan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Keberadaan industri tersebut tersebar pada beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, dimana Kecamatan Padalarang dan Kecamatan Batujajar merupakan wilayah yang memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai tambah sektor industri di Kabupaten Bandung Barat.

Pada posisi kedua, kontribusi sektor perdagangan/hotel/restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan sarana perdagangan terlihat cukup signifikan pada periode tahun terakhir. Keberadaan pusat perbelanjaan dan beberapa supermarket menjadi determinasi kinerja sektor ini. Namun pasar tradisional permanen tetap mampu menjadi basis perdagangan tradisional, dengan penataan dan pengelolaan yang rapi.

Pada sektor perdagangan dan jasa dikontribusi oleh sektor formal dan informal. Sektor formal merupakan sektor yang pekerjaannya di dalamnya menuntut tingkat keterampilan yang tinggi, memiliki keahlian khusus yang biasanya hal ini sulit dipenuhi oleh para pendatang dari daerah pedesaan yang kurang memiliki keterampilan yang ahli. Sedangkan sektor informal sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang tidak terdaftar secara resmi, tidak mempunyai organisasi, tidak teratur, serta tidak terdaftar di dalam badan usaha resmi milik negara. Pengertian sektor informal yaitu berupa lingkungan usaha tidak resmi atau lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja seperti wiraswasta. Dan biasanya sektor informal banyak terdapat pada perdagangan yang dilakukan di pasar tradisional. Yang paling menonjol aktifitasnya adalah para pedagang yang ada di suatu pasar tersebut.

Pedagang sebagai bagian dari sektor informal kota merupakan lahan pekerjaan yang terbuka bagi siapapun. Disisi lain, keberadaan pasar sendiri memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai salah satu sumber keuangan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dengan kapasitasnya yang besar untuk menyerap pedagang, dan mewadahi lalu lintas uang yang terus bergerak dinamis dari hari ke hari, maka keberadaan pasar menjadi sangat strategis untuk terus dikembangkan (Suyanto, 2002:8).

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 9 pasar tradisional. Banyaknya pasar tradisional di Kabupaten Bandung Barat ini dapat dikaitkan dengan mengingat banyaknya jumlah penduduk pada tahun 2015 yang mencapai 1.669.980 jiwa, sehingga untuk melayani kebutuhan penduduk tersebut diperlukannya beberapa pasar. Salah satu pasar yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu Pasar Panorama Lembang yang terletak di Kecamatan Lembang.

Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang no. 112 tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern serta penjabaran

teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI) Nomor : 53/M-DAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mengingat jumlah penduduk yang berada di Kecamatan Lembang yang luasnya 95,64 km<sup>2</sup> , pada tahun 2015 jumlah total penduduk sebanyak 192.019 jiwa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menyediakan fasilitas penunjang kebutuhan masyarakat dengan mendirikan Pasar Panorama Lembang pada tahun 1971. Di Kecamatan Lembang sendiri hanya terdapat dua buah pasar yaitu Pasar Panorma Lembang dan Pasar Buah-buahan yang letaknya tidak begitu berjauhan. Namun pasar Panorama Lembang ini sendiri kedudukannya lebih utama dibandingkan dengan pasar buah tersebut, karena selain besar dan memiliki kelengkapan pasar Panorama Lembang tersebut juga telah dibentuk posisinya menjadi pasar semi modern kelas A.

Pada 14 mei 2015 di Pasar Panorama Lembang, telah terjadi sebuah musibah yaitu terbakarnya semua unit kios pertokoan yang ada di Pasar Panorama Lembang. Pada saat kejadian aktivitas berdagang di pasar sendiri sebenarnya masih berjalan, terutama para pedagang yang menjajakan dagangannya di sekitar pintu masuk Terminal Lembang, seperti pedagang sayuran dan daging ayam. Namun kobaran api cepat menjalar ke seluruh bangunan pasar yang memiliki dua lantai itu. Api meludeskan ratusan kios permanen di Pasar Panorama Lembang. Jumlah tersebut belum termasuk los dan jongko pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekeliling area pasar.

Diketahui jumlah kios yang terbakar sebanyak 848 unit. Pasar Panorama Lembang ini ada 13 blok yaitu blok A hingga blok M. Berdasarkan data Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Bandung Barat jumlah tempat berjualan yang terbakar terdiri 848 kios, 670 los

dan 325 PKL sehingga jumlah total nya yaitu sebanyak 1.843. Namun setelah terjadinya kebakaran tersebut, kondisi pasar saat ini telah diratakan karena akan segera kembali dibangun dan para pedagang yang semula berjualan didalam pasar kini direlokasi sementara ke area parkir pasar, pedagang yang berjualan di area tersebut kini berjumlah 701 pedagang dan data tersebut didapat dari Disperindag Kabupaten Bandung Barat.

Dengan kejadian kebakaran Pasar Panorama Lembang ini tentunya menyebabkan kerugian yang sangat besar. Terutama bagi para pedagang yang memiliki kios dan berjualan disana, semua barang yang mereka jadikan sebagai tumpuan mata pencaharian uang sehari-hari habis terbakar. Kebakaran pasar membuat para pedagang harus memikirkan bagaimana caranya mereka untuk dapat memperbaiki kondisi ekonomi mereka, karena kerugian tersebut para pedagang harus memiliki modal kembali untuk dapat berjualan setelah barang dagangan mereka habis terbakar. Karena jika belum ada upaya dari pemerintah untuk bisa memberikan bantuan, mereka pun harus berupaya membayar sewa lahan yang sementara bisa digunakan untuk berjualan kembali. Selain itu para pedagang mengakui bahwa setelah terjadinya kebakaran tersebut kondisi perekonomian mereka hampir 90% berkurang dibandingkan dengan sebelumnya karena selain lahan yang kurang nyaman juga modal yang mereka gunakan pun terbilang tidak maksimal. Menurut Disperindag Kabupaten Bandung Barat, pedagang yang akan tetap berjualan tetap yang harus memiliki IPK (Izin pedagang kios) dan IPL (Izin pedagang los).

Selain bagi para pedagang, masyarakat sekitar daerah Pasar panorama Lembang pun ikut mengalami kerugian, Seperti kita ketahui bahwa Pasar Panorama Lembang juga merupakan pusat perbelanjaan utama di daerah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat tersebut. Dengan terjadinya musibah kebakaran tersebut masyarakat menjadi lebih sulit untuk berbelanja, walaupun tempat relokasi pedagang sementara masih berada di sekitar lokasi pasar yang terbakar, namun tempatnya tidak nyaman bagi konsumen untuk berbelanja.



Selain itu masyarakat pun sedikit menjadi terganggu dengan dipindahkannya posisi para pedagang karena para pedagang tersebut banyak yang mengambil jalur transportasi sehingga saat ini sering terjadi kemacetan di daerah sekitaran pasar itu karena akses jalan yang terpakai oleh para pedagang yang ditempatkan sementara di lokasi tersebut.

Dalam menyikapi hal tersebut, peran pemerintah sangatlah penting untuk bisa mengambil kebijakan dan membantu memulihkan kembali kondisi pasar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian di Lembang dan menjadi sumber mata pencaharian para pedagang.

Mengacu pada hal tersebut, Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Lembang telah menjalankan aturan-aturan tentang keberadaan pasar, sesuai dengan Perda nomor 21 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pasar, retribusi pelayanan pasar dan retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan. Perda tersebut mengatur mengenai penataan pasar, renovasi/relokasi, pengelola dan pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah, perizinan dan izin pendirian pasar.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Daerah dalam merelokasi para pedagang pasca kebakaran, serta sejauh mana dampak relokasi para pedagang ke tempat sementara, terhadap usaha para pedagang tersebut dan umumnya terhadap masyarakat sekitar lokasi pasar tersebut. Maka dari itu penulis mengambil judul **“Analisis Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasca Kebakaran Pasar dari Sisi Pedagang dan Masyarakat (Studi Kasus: Pasar Panorama Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dapat diformulasikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengatur para pedagang pasar pasca kebakaran ?
2. Bagaimana dampak bagi pedagang dan masyarakat dengan adanya kebijakan relokasi pedagang pasca kebakaran pasar Panorama Lembang ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatur para pedagang pasar pasca kebakaran.
2. Untuk mengetahui dampak bagi pedagang dan masyarakat dengan adanya kebijakan relokasi sementara pedagang pasca kebakaran pasar Panorama Lembang.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam dunia perekonomian dimasyarakat. Searah dengan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan kegunaan teoritis atau akademis berupa tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan fakultas ekonomi.

### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan praktis atau empiris berupa :

1. Untuk melengkapi program perkuliahan S1, program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung.
2. Sebagai salah satu media latih untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang dipelajari.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan pasca kebakaran pasar dilihat dari sisi pedagang dan masyarakat sekitar.

## BAB II

### KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Teori

Dalam penelitian ini dibutuhkan *review* terhadap teori-teori dan norma-norma yang relevan terkait dengan Dampak Kebijakan Pasar Pasca Kebakaran dari sisi Pedagang dan Masyarakat.

##### 2.1.1. Pasar dan Pembagian Pasar

###### a. Definisi Pasar

Pasar merupakan suatu daerah dimana pembeli dan penjual saling berhubungan satu sama lainnya, untuk melakukan pertukaran barang maupun jasa pada waktu-waktu tertentu. (Amir, 2000:186). Perumusan pasar dan pengertian dalam bidang ekonomi terdiri atas lima komponen yaitu:

- 1) Adanya wilayah (*area place*).
- 2) Adanya pelaku (*subject*) penjual dan pembeli.
- 3) Adanya kegiatan untuk saling berhubungan antar subjek pasar.
- 4) Adanya objek (barang-barang dan jasa).
- 5) Faktor waktu.

Menurut J.F Deniau (Amir, 2000:189). pasar pada tingkat pertama adalah suatu tempat berjualan (*a place of sale*). Semenjak kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh negara-negara anggota pasar bersama, Eropa khususnya dalam bidang ekonomi, maka timbul gagasan di sementara negara baik di Asia dan negara lain yang serupa untuk

mendirikan persekutuan yang serupa dengan negara tetangga yang disebut dengan pasar regional bersama.

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Berfungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi yang menggerakkan kehidupan ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang. Oleh karena itu bagian ini membahas tentang pasar. Selain itu aspek yang tidak kalah menariknya untuk didiskusikan adalah aspek ruang dan waktu dari pasar serta dari pasar serta aspek tawar menawar yang terjadi di pasar (Damsar, 1997:101).

#### b. Pembagian Pasar

Secara sederhana, definisi pasar selalu dibatasi oleh anggapan yang menyatakan antara pembeli dan penjual harus bertemu secara langsung untuk mengadakan interaksi jual beli. Namun, pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya benar karena seiring kemajuan teknologi, internet, atau malah hanya dengan surat. Pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, mereka dapat saja berada di tempat yang berbeda atau berjauhan. Artinya, dalam proses pembentukan pasar, hanya dibutuhkan adanya penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar dibagi menjadi tiga yaitu pasar tradisional, pasar modern, dan pasar semi tradisional modern.

##### 1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar yang terjadi. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan

barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Jawa Barat, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan dan perkampungan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Sisi negatif dari pasar tradisional adalah keadaannya yang cenderung kotor dan kumuh sehingga banyak orang yang enggan berbelanja di sana.

## 2) Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.

Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti; buah, sayuran, daging; sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama, seperti sabun, gula, parfum dan lain-lain. Berbeda dengan pasar tradisional yang identik dengan lingkungannya yang kotor, pasar modern justru kebalikannya. Maka dari itu, masyarakat sekarang cenderung memilih pasar modern sebagai tempat belanja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh dari pasar modern adalah pasar Swalayan, Indomaret, Hypermarket, Supermarket, dan Minimarket.

## 3) Pasar Semi Tradisional Modern

Pasar semi tradisional modern adalah pasar yang mengalami transisi dari pasar tradisional menuju pasar modern. Dapat dikatakan modern karena bentuk fisik bangunan yang tertata rapi dan tertib antara stan satu dengan stan lainnya serta manajemen pasar tersusun secara terorganisir. Namun pasar jenis ini masih ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung yang biasanya ada

proses tawar-menawar. Barang-barang yang dijual terdiri dari makanan pokok, buah, fashion, hingga kebutuhan sehari-hari yang dapat bertahan lama, seperti gula, garam, sabun dan lain-lain.

**a. Pasar Menurut Jumlah Penjual dan Pembeli**

Sukirno (2006: 231) pasar menurut jumlah penjual dan pembeli ada 5 macam, yaitu sebagai berikut:

1) Pasar persaingan sempurna

Pasar persaingan sempurna adalah pasar dimana terdapat berbagai penjual dan pembeli. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna:

- a) Perusahaan adalah *price taker*
- b) Perusahaan mudah keluar masuk pasar
- c) Menghasilkan barang yang serupa terdapat banyak perusahaan di pasar.

2) Pasar monopoli

Pasar monopoli adalah pasar dimana terdapat satu penjual saja dan terdapat banyak pembeli. Ciri-ciri pasar monopoli:

- a) Hanya ada satu penjual
- b) Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti output yang dijual monopolist.
- c) Penjual sebagai *price maker*.
- d) Adanya halangan bagi penjual lain untuk memasuki pasar.

3) Pasar monopsoni

Pasar monopsoni adalah pasar dimana terdapat banyak penjual dan terdapat satu pembeli.

#### 4) Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah pasar dimana terdapat sedikit penjual dan terdapat banyak pembeli.

#### 5) Pasar Oligopsoni

Pasar oligopsoni adalah pasar dimana terdapat banyak penjual dan terdapat sedikit pembeli.

### **b. Fungsi Pasar**

Menurut Soeratno (2003: 12) pasar berperan sangat penting dalam suatu sistem ekonomi. Terdapat 5 fungsi utama pasar dan setiap fungsi mengandung pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem ekonomi. Fungsi pasar tersebut adalah:

- 1) Pasar menentukan harga barang. Pada sistem ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai barang. Jika suatu barang permintaannya meningkat, berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak. Alam jangka yang relative singkat perusahaan tidak bisa menambah jumlah barang yang ditawarkan secara seketika. Akibatnya harga barang tersebut naik. Kenaikan harga suatu barang akan mendorong produsen memproduksi barang tersebut (jawaban masalah *what*).
- 2) Pasar dapat mengorganisasi produksi. Harga barang di pasar menjadi acuan perusahaan dalam menentukan metode produksi yang paling efisien (jawaban masalah *how*).
- 3) Pasar mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
- 4) Pasar melakukan penjatahan. Konsumsi saat ini dibatasi oleh jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan saat ini.
- 5) Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Tabungan dan investasi yang terjadi di pasar merupakan usaha untuk memelihara sistem dan



memberikan

kemajuan

aktivitas

ekonomi.

### **2.1.2. Definisi Sektor Informal**

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti di negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor informal dan formal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para pendatang telah tertampung di sektor formal, namun sebagian pendatang lainnya tanpa bekal keterampilan yang dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya dan mereka yang tidak tertampung pada sektor formal bekerja pada sektor informal ( Harsiwi, 2002: 1 ).

Walaupun penelitian telah banyak dilakukan di berbagai negara, sampai sekarang belum diperoleh suatu definisi sektor informal yang baku. Tetapi ada semacam consensus diantara para peneliti tersebut. Pertama, bahwa sektor informal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi. Ini terlihat dengan dibaginya kegiatan usaha disektor tersebut. Kedua, bahwa yang di analisa adalah perilaku unit usaha dan bukan keluarga atau individu. Dari ebebrapa definisi sektor informal hanya Sethurman (dari ILO) yang berhasil mencoba merumuskan definisi sektor informal tersebut. Sethurman memberikan definisi teoritis sektor informal adalah sebagai berikut (Hidayat, 2004: 560): “Sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai

kendala seperti faktor modal fisik, maupun manusia (pengetahuan) dan faktor-faktor keterampilan.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks. Oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas ( Harsiwi, 2002: 2).

Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya disektor informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada umumnya mereka tidak mempunyai keterampilan khusus dan sangat kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktifitas dan pendapatan mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis yang ada disektor formal. Selain itu, mereka yang berada di sektor informal tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan yang berada disektor formal, misalnya tunjangan keselamatan kerja dan dana pension.

Sektor informal pada umumnya merupakan unit usaha yang berskala kecil, bermodal relative rendah serta ruang lingkup dan pengembangan usaha yang terbatas. Ciri-ciri dari sektor informal yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik.
- b. Belum mempunyai ijin usaha yang resmi.
- c. Teknologi yang digunakan sangat sederhana.
- d. Modal serta perputaran usahanya sangat terbatas.
- e. Pendidikan formal dari para pengelolanya tidak menjadi pertimbangan dalam usahanya.

- f. Usahanya bersifat mandiri, jika ada karyawan biasanya dari keluarga sendiri.

Ciri-ciri kegiatan sektor informal adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan usahanya tidak terorganisasi secara baik, sebab tidak menggunakan fasilitas kelembagaan yang tersedia di sektor ini.
- b. Kegiatan usahanya tidak mempunyai ijin usaha.
- c. Pola kegiatannya tak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jasa kerja.
- d. Kebijakan pemerintah dalam membantu golongan ekonomi lemah tak menyentuh sektor ini.
- e. Unit usaha sudah keluar masuk dari sub sektor ke lain sub sektor
- f. Teknologi yang dipakai cukup sederhana.
- g. Modal dan perputaran usaha relative kecil, sehingga skala operasinya juga kecil.
- h. Usaha yang dijalankan tak memerlukan pendidikan formal, tapi hanya dari pengalaman bekerja.
- i. Unit usaha yang dijalankan sendirian dan walaupun ada buruh, mereka ada pertalian keluarga.
- j. Sumber dana sebagai modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi serta hasil produksi dan jasa konsumsi oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah, tapi kadang-kadang juga berpenghasilan menengah.

### **2.1.3. Kebijakan Pemerintah**

- a. Definisi Kebijakan

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Keneth Prewit yang dikutip Charles O.

Jones, dalam Suharno (2010:12) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu.

Richard Rose dalam Suharno (2010: 11-12) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan kebijakan hendaknya sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

#### a. Tujuan Kebijakan

Konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial senantiasa berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial. Tujuan pemecahan masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena adanya suatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat destruktif atau patologis yang mengganggu dan merusak tatanan masyarakat (misalnya kenakalan remaja). Suharto, 2005: 61).

Tujuan pemenuhan kebutuhan mengandung arti menyediakan pelayanan-pelayanan sosial yang diperlukan, baik dikarenakan adanya masalah maupun tidak ada masalah, dalam arti bersifat pencegahan (mencegah terjadinya masalah, mencegah meluasnya masalah, dan mencegah terulangnya kembali suatu masalah, atau pengembangan dalam arti (meningkatkan kualitas suatu kondisi agar lebih baik dari keadaan sebelumnya). Secara lebih rinci, tujuan kebijakan sosial adalah:

1. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah sosial yang ada di masyarakat.
2. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara sendiri-sendiri melainkan harus melalui tindakan kolektif.
3. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
4. Meningkatkan situasi dan lingkungan sosial ekonomi, yang kondusif bagi upaya pelaksanaan pelaksanaan peran-peran sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat kemanusiaan.
5. Menggali mengalokasikan dan mengembangkan sumber- sumber kemasyarakatan demi tercapainya kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Suharto, 2005: 59-62).

#### b. Analisa Kebijakan

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan (E.S. Quade dalam Dunn, 1994). Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan publik. Kebijakan didasarkan pada masalah yang ada di daerah, selanjutnya kebijakan harus secara terus menerus dipantau, direvisi dan ditambah agar tetap memenuhi kebutuhan yang terus berubah.

Analisis kebijakan tidak diciptakan untuk membangun dan menguji teoriteori deskriptif yang umum namun mengkombinasikan dan mentransformasikan substansi dan metode beberapa disiplin ilmu sehingga menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah publik.

Analisis kebijakan juga meliputi evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Analisis kebijakan diharapkan untuk menghasilkan informasi mengenai : (1) nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi, (2) fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan (3) tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam analisis kebijakan, yaitu :

1. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang menjelaskan sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik.
2. Pendekatan evaluatif adalah pendekatan yang berkenaan dengan penentuan bobot atau nilai dari beberapa kebijakan.
3. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik.

Sebagai proses penelitian analisis kebijakan menggunakan prosedur analisis umum yang biasa dipakai untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan, yaitu: deskriptif, prediksi, evaluasi, dan rekomendasi. Dari segi waktu dalam hubungannya dengan tindakan maka prediksi dan rekomendasi, digunakan sebelum tindakan diambil, sedangkan evaluasi digunakan setelah tindakan terjadi.

### c. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan erat dengan kebijakan publik. Kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi pemerintah melainkan lebih dari itu, lebih menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan. Kebijakan publik sangat erat dengan putusan

pemerintahan dalam proses pembangunan. Kebijakan publik menjadi penting apabila kebijakan tersebut dijalankan atau diimplementasikan (Sumaryadi, 2010: 83).

#### **2.1.4. Relokasi**

Relokasi merupakan pemindahan suatu tempat ke tempat yang baru. Relokasi adalah salah satu wujud dari kebijakan pemerintah daerah yang termasuk dalam kegiatan revitalisasi. Revitalisasi dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) berarti proses, cara, dan perbuatan menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya kurang terberdaya. Salah satu cara merevitalisasi atau membangun pasar tradisional yang baru adalah menciptakan pasar tradisional dengan berbagai fungsi, seperti tempat bersantai dan rekreasi bersama dengan keluarga.

#### **2.1.5. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam ekonomi pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan, yaitu:

1. Pedagang distributor (tunggal) yaitu pedagang yang memegang hak distribusi atau produk dari perusahaan tertentu.
2. Pedagang (partai) besar yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual kepada pedagang lain.

Pedagang eceran yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen (Damsar,1997: 106-107).

### 2.1.6. Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil “penjualannya” dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini “membeli” faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Suryananto, 2005: 15).

Menurut Sukirno (2006: 76) permintaan seseorang akan suatu barang ditentukan oleh banyak faktor. Di antara beberapa faktor tersebut yang paling penting yaitu sebagai berikut:

- a. Harga barang itu sendiri.
- b. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut.
- c. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
- d. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat.
- e. Citra rasa masyarakat.
- f. Jumlah penduduk.
- g. Ramalan mengenai dimasa yang akan datang.

Jenis-jenis pendapatan dibagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Gaji dan Upah

Yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.

- b. Pendapatan dari usaha sendiri



Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar. Usaha disini adalah usaha milik sendiri atau keluarga. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri serta nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.

c. Pendapatan dari usaha lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga dan biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki, bunga dan uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pension. Untuk mengukur tingkat pendapatan dapat dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan banyak dan mempunyai nilai jual yang tinggi dan biaya produksi yang rendah, maka dengan sendirinya tingkat keuntungan yang diperoleh akan tinggi.

Menurut Swasta (2000: 201) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dari kegiatan penjualan antara lain:

a. Kondisi dan Kemampuan Pedagang

Transaksi jual beli melibatkan pihak pedagang dan pembeli. Pihak pedagang harus meyakinkan pembeli agar dapat mencapai sasaran penjualan yang diharapkan dan sekaligus mendapatkan pendapatan yang diinginkan.

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli barang dan jasa meliputi baik tidaknya keadaan pasar tersebut, jenis pasar, kelompok pembeli, frekuensi pembeli dan selera pembeli.

c. Modal

Setiap usaha membutuhkan modal untuk usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dalam kegiatan penjualan semakin banyak produk yang

dijual berdampak pada kenaikan keuntungan. Untuk meningkatkan produk yang dijual suatu usaha, harus membeli jumlah barang dagangan dalam jumlah besar. Untuk itu dibutuhkan tambahan modal untuk membeli barang dagangan atau membayar biaya operasional agar tujuan meningkatkan keuntungan dapat tercapai.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Semakin besar suatu perusahaan akan memiliki bagian penjualan yang semakin kompleks untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar dari usaha kecil.

e. Faktor lain

Faktor lain yang mempengaruhi pendapatan usaha yaitu periklanan ataupun kemasan produk.

### **2.1.7. Analisis Dampak**

Evaluasi dampak (*impact evaluation*) adalah kegiatan menilai perubahan-perubahan yang diakibatkan sebuah intervensi, seperti proyek, program atau kebijakan, baik berupa perubahan yang direncanakan maupun yang tak direncanakan. Berbeda dengan monitoring dampak (*outcome monitoring*) yang bertujuan menilai sejauh mana sasaran telah dicapai, evaluasi dampak dilakukan untuk menjawab pertanyaan: “seperti apa perubahan dampak yang dialami partisipan apabila intervensi tidak dilakukan?”.

Evaluasi dampak berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk sebab-dan-akibat (*cause-and-effect*). Dengan kata lain, evaluasi dampak mengukur perubahan dampak yang *secara langsung* diakibatkan oleh sebuah program.

Evaluasi dampak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (1) prospektif dan (2) retrospektif. Pada evaluasi yang bersifat prospektif, penilaian dampak dirancang pada waktu yang bersamaan dengan perancangan program dan disertakan dalam implementasi program. Data baseline dikumpulkan sebelum pelaksanaan program, baik untuk

kelompok intervensi maupun untuk kelompok pembanding. Evaluasi yang bersifat restrospektif menilai dampak program setelah program dilaksanakan, yaitu menilai bagaimana dampak program bagi kelompok intervensi dibandingkan dengan kondisi yang terjadi pada kelompok pembanding (Gertler, P.J., et al. 2011).

Untuk mengukur seberapa besar dampak suatu program yang dirasakan oleh kelompok yang dikenai program, dapat diformulasikan sebagai berikut.

**Program Impact :**

$$= (Y/P=1) - (Y/P=0)$$

$$= \text{Outcome status with program} - \text{Outcome status without program}$$

Yaitu perbedaan antara outcome yang diperoleh kelompok yang mendapat intervensi program dengan outcome yang diperoleh kelompok tersebut jika tidak mendapat intervensi pada periode yang sama. Permasalahannya adalah tidak mungkin melakukan observasi pada kelompok yang sama untuk dua kondisi yang berbeda secara simultan atau bersamaan. Permasalahan ini yang disebut dengan istilah "*counterfactual problem*".

Walaupun kita dapat mengobservasi dan mengukur outcome (Y) untuk kelompok partisipasi program ( $Y | P = 1$ ), namun tidak ada data untuk mengukur bagaimana outcome kelompok ini jika tidak ada program ( $Y | P = 0$ ). Dalam formula tersebut, maka ( $Y | P = 0$ ) menunjukkan *outcome counterfactual*.

Oleh karena *outcome counterfactual* ini tidak dapat dihitung secara langsung dari kelompok partisipasi program, maka dapat dilakukan estimasi, yaitu dengan cara membuat kelompok kontrol atau kelompok pembanding. Kelompok pembanding ini harus identik atau mempunyai karakteristik yang sama dengan kelompok partisipasi.

Untuk mendapatkan kelompok pembanding dengan karakteristik yang sama dengan kelompok partisipasi tidak mudah. Oleh karena seringkali adanya kesulitan dalam mencari kelompok pembanding, oleh karena itu terdapat dua metode yang umum dipakai dalam mengantisipasi tidak adanya kelompok pembanding tersebut. Metode ini walaupun beresiko, namun secara ilmiah metode ini dapat dipergunakan dan biasa dipakai untuk membentuk kelompok pembanding dalam rangka mengestimasi *counterfactual*. Metode tersebut adalah:

1. Metode sebelum dan sesudah (*before-after atau pre-post method*)

Yaitu membandingkan outcome dari kelompok partisipasi sebelum dan setelah program dilaksanakan.

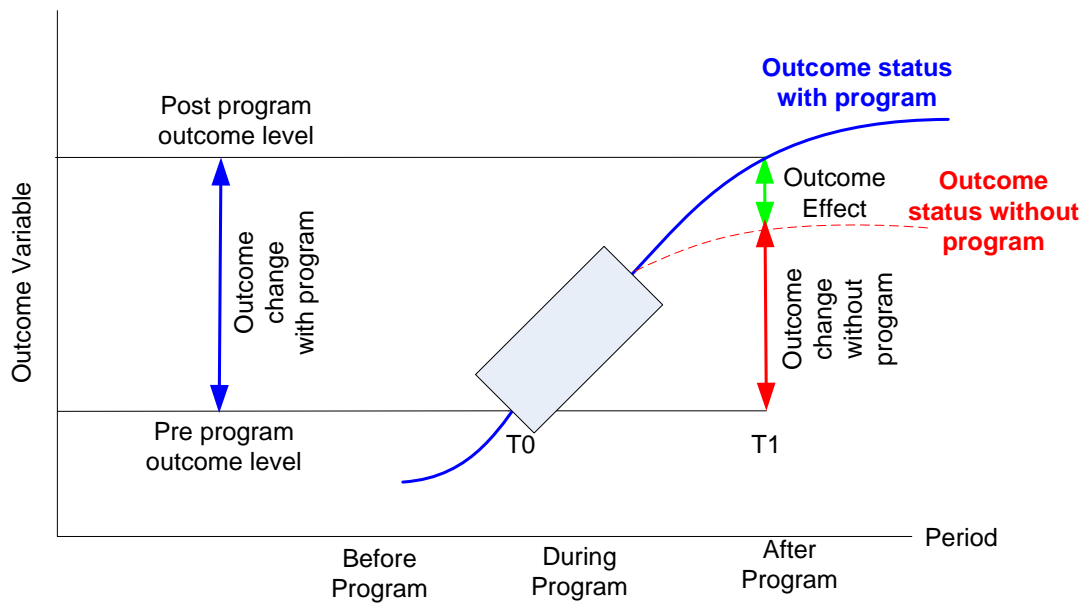
2. Dengan dan tanpa (*with and without method*)

Yaitu membandingkan outcome kelompok partisipan dengan kelompok yang tidak ikut program.

Berdasarkan konsep outcome tersebut, maka perlu dibedakan antara tiga konsep hasil atau outcome sebagai berikut:

1. *Outcome Level* adalah status atau kondisi outcome pada satu periode tertentu.
2. *Outcome Change* adalah perbedaan outcome level pada dua periode yang berbeda
3. *Outcome Effect* atau *Program Impact* adalah bagian dari outcome change yang dikontribusi oleh program sebagai lawan dari akibat faktor lain.

Perbedaan ketiga konsep outcome tersebut dapat digambarkan dengan skema berikut.



**Gambar 2.1 Perbedaan Ketiga Konsep Outcome**

Dari gambar 2.1 diatas, dampak dari pelaksanaan suatu program dapat diukur dengan cara membandingkan antar *outcome* kelompok sasaran yang dilewati program jika mereka dapat program dan *outcome* kelompok sasaran tersebut jika mereka tidak mendapatkan program.

**Tabel 2.1 Metode Pengukuran Dampak Suatu Program**

Ukuran	Yang diukur
<b>Outcome change with program</b>	<p>A. Kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) pada T0 atau sebelum program dilaksanakan = <i>Pre program outcome level</i> = OI0</p> <p>B. Kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) pada T1 atau sesudah program dilaksanakan = <i>Post program outcome level</i> = OI1</p> <p>C. Perbedaan kondisi kelompok masyarakat penerima bantuan (kelompok intervensi) sebelum (T0) dan sesudah (T1) program dilaksanakan = <i>outcome change with program</i> = OCWP = OI1 – OI0</p>
<b>Outcome change without program</b>	<p>A. Kondisi kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan (kelompok pembanding) pada T0 = OP0</p> <p>B. Kondisi kelompok masyarakat yang tidak mendapat bantuan (kelompok pembanding) pada T1 = OP1</p> <p>C. Perbedaan kondisi kelompok masyarakat yang tidak menerima bantuan (kelompok pembanding) antara periode T0 dan T1 = OCNP = OP1 – OP0</p>
<b>Outcome Effect</b>	Perbedaan antara outcome change with program dengan outcome change without program = OCWP - OCNP

Sumber: Gertler, P.J. et al. 2011. *Impact Evaluation in Practice. The World Bank.*

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkaya perspektif penelitian ini, maka selain dari kajian teori yang telah dijelaskan, dilakukan juga review terdahulu beberapa penelitian sebelumnya.

1. Desi Widya Lutfy (2001) mahasiswa Universitas Gajah Mada yang berjudul “Dampak kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi para pedagang di pasar induk Giwangan Yogyakarta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah kota Yogyakarta tentang relokasi pedagang pasar

*shopping* dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan relokasi pedagang pasar *shopping* bagi pedagang eks pasar *shopping*.

Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *before and after*. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengupas tentang dampak dari sebuah kebijakan publik yaitu relokasi pedagang pasar *shopping* ke-pasar Giwangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap relokasi pedagang pasar *shopping* sebagai sebuah rangkaian proses kebijakan yang dilaksanakan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilaksanakan adalah sama-sama membahas tentang dampak kebijakan tentang relokasi untuk para pedagang. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Desi Widya Lutfy dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui proses perumusan kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta tentang relokasi pasar dan dampak yang ditimbulkan di pasar *shopping*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui dampak kebijakan relokasi pedagang pasar pasca kebakaran yang dilihat dari sisi pedagang dan masyarakat.

2. Dwi Eliyani (2012) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul “Dampak relokasi pasar Imogiri terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang di pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak relokasi Pasar Imogiri kecamatan Imogiri kabupaten Bantul, dan untuk mengetahui dampak relokasi pasar Imogiri terhadap kondisi ekonomi pedagang di pasar Imogiri kecamatan Imogiri.,dan kondisi sosial serta dampak relokasi pasar terhadap kondisi ekonomi pedagang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak relokasi terhadap kondisi social ekonomi pedagang di

pasar Imogiri Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, maka dapat diambil kesimpulan bahwa relokasi pasar tersebut memberikan dampak positif terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan dan terciptanya peningkatan interaksi yang baik. Selain daripada itu, faktor lokasi yang strategis juga memberikan dampak yang cukup baik bagi para pedagang dengan bertambahnya pelanggan. Dan setelah relokasi tersebut modal dagangan mengalami peningkatan.

3. Eka Setyowati (2013) “Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari Ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta” Keberadaan PKL seringkali menimbulkan permasalahan di perkotaan. Seperti halnya PKL di kawasan Monumen 45 Banjarsari yang telah menyalahgunakan ruang public sebagai tempat untuk melakukan aktivitas ekonomi mereka. Hal itu telah menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Maka dari itu, Pemkot merelokasi PKL Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Semanggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang ditimbulkan dari relokasi PKL tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan relokasi PKL yang melibatkan berbagai SKPD yang bekerjasama dengan TNI dan POLRI itu berjalan secara damai, tertib serta dimeriahkan dengan prosesi kirab budaya. Kebijakan tersebut tersebut menimbulkan beberapa dampak, diantaranya dampak social, dampak fisik, dampak ekonomi dan dampak politik. Secara umum, dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut menunjukkan tercapainya tujuan kebijakan walaupun ada sedikit dampak yang tidak diinginkan. Penilaian terhadap dampak kebijakan ini juga menunjukkan bahwa kebijakan relokasi tersebut telah cukup memenuhi enam kriteria evaluasi kebijakan public yang meliputi: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.



### 2.3. Kerangka Pemikiran

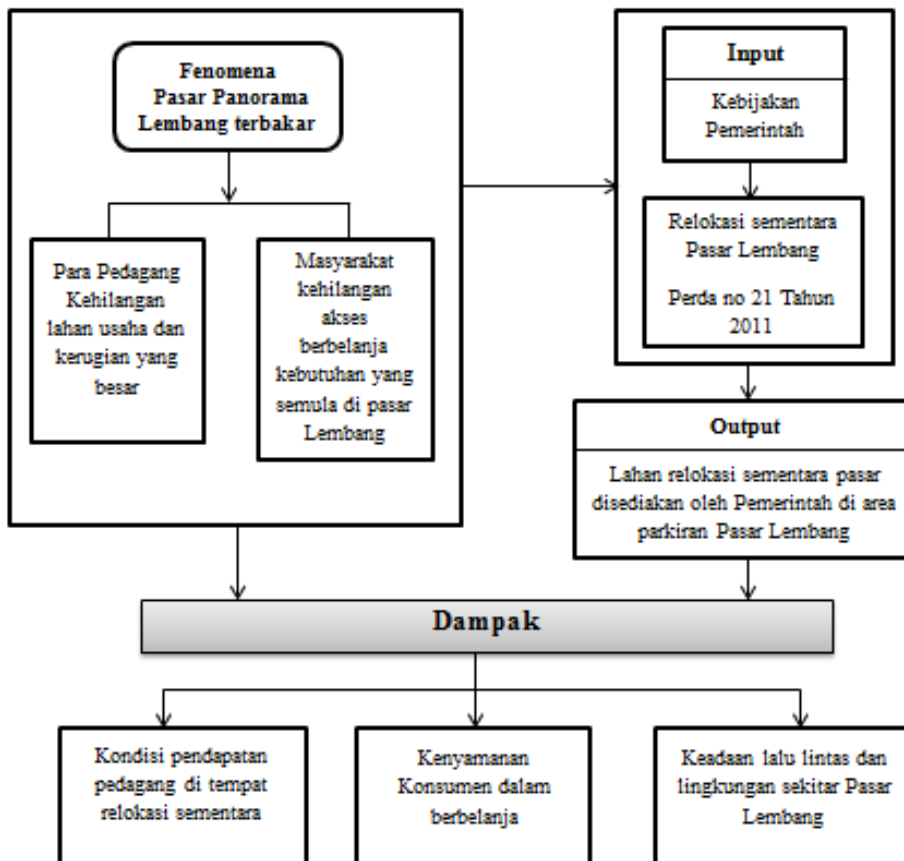
Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan atau masalah yang ada dalam masyarakat. Dalam setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pasti memiliki tujuan-tujuan dari adanya kebijakan tersebut. Tentunya dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan akan membuat keadaan masyarakat menjadi lebih baik. Setiap kebijakan publik pasti menimbulkan suatu dampak. Demikian juga dengan kebijakan relokasi pedagang pasca kebakaran di Pasar Panorama Lembang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat melalui Dinas Pengelola Pasar.

Evaluasi dampak dapat menggunakan jenis studi evaluasi yang dikemukakan oleh Finsterbusch dan Motz (dalam Wibawa, 1994: 74) yaitu menggunakan *single program before after*. Dimana evaluator hanya menggunakan kelompok eksperimen yaitu kelompok yang dikenai kebijakan untuk memperoleh data dari evaluasi dampak kebijakan ini. Dalam menggunakan jenis evaluasi *single program before after* ini untuk memperoleh data mengenai keadaan pedagang Pasar Panorama Lembang pasca kebakaran sebelum dan sesudah pelaksanaan dari kebijakan relokasi tersebut.

Dengan terjadinya fenomena kebakaran Pasar Lembang pada tanggal 8 Mei 2015 menyebabkan para pedagang kehilangan lahan usaha dan kerugian yang sangat besar, masyarakat sekitar kehilangan akses berbelanja kebutuhan yang semula berada di Pasar Lembang. Dalam Perda no 21 tahun 2011 yang didalamnya mengatur mengenai penataan pasar, renovasi/relokasi, pengelola dan pemanfaatan pasar milik pemerintah daerah, perizinan dan izin pendirian pasar. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu, lahan relokasi sementara yang disediakan pihak pemerintah ditempatkan di area parkir Pasar Lembang.

Oleh karena itu maka pemerintah membuat kebijakan bagaimana cara supaya para pedagang masih tetap bisa berjualan, sementara pasar Lembang itu dibangun dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga pemerintah membuat kebijakan merelokasi sementara ke area parkir Pasar Lembang. Pedagang yang berhak menempati tempat relokasi sementara adalah pedagang yang memiliki Izin Pedagang Los (IPL) dan Izin Pedagang Kios (IPK) di Pasar Lembang sebelumnya. Jumlah pedagang yang menempati tempat relokasi tersebut berjumlah 701 pedagang dengan fasilitas masing-masing pedagang diberikan lahan kurang lebih 1x2 m dan fasilitas listrik. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pedagang adalah dengan tetap membayar retribusi kepada pengelola pasar.

Dengan kondisi tempat berjualan sementara yang tentunya berbeda jauh dengan tempat jualan yang sebelumnya, tentu memberikan dampak terhadap para pedagang itu sendiri, konsumen, maupun masyarakat sekitar. Pedagang yang dulunya menempati los yang cukup besar, sekarang ini hanya menempati tempat los lebih kecil, yang kemungkinan tidak mencukupi untuk menanggung barang-barang dagangan mereka. Disisi lain konsumen enggan untuk berbelanja ke pasar atau tempat relokasi itu dikarenakan keadaan tempatnya yang kurang nyaman. Keadaan ini tentunya juga berakibat pada penurunan omset penjualan pedagang di tempat relokasi sementara tersebut. Disamping itu, secara umum masyarakat sekitar juga dirugikan karena tempat sementara yang berada di area parkir menyebabkan tempat parkir terganggu dan mengambil lahan jalan, sehingga seringkali terjadi kemacetan di sekitar lokasi pasar sementara tersebut. Adapun kerangka pemikiran mengenai penelitian ini seperti yang ada pada gambar 2.2 berikut :



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

#### 2.4. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan/pernyataan sementara yang diungkapkan secara deklaratif/ yang menjadi jawaban dari sebuah permasalahan. Pernyataan tersebut diformulasikan dalam bentuk variable agar bisa diuji secara empiris.

Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian dan melihat hasil penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran teoritis tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah bahwa:

- Adanya perubahan pendapatan pedagang sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran pasar Lembang.
- Ada perubahan jumlah dan kenyamanan konsumen/pembeli yang berbelanja ke pasar Lembang

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha 2013-2015*. Bandung Barat: CV Nugraha.
- Eliyani, Dwi. 2012. *Dampak Relokasi Pasar Imogiri Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Imogiri Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*. Jurnal Sosiologi Islam.
- Lutfy, Desi Widya. 2001. *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Shopping Bagi Para Pedagang di Pasar Induk Giwangan Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Nicholson, Walter. 1995. *Teori Ekonomi Mikro Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Swasta, Basu. 2000. *Pengantar Bisnis Modern, Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, Jakarta : Liberty.
- Setyowati, Eko. 2013. *Evaluasi Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Monumen 45 Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo Kota Surakarta*. JurnalAdministrasiPublik, <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id>
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press
- Sukirno, Sadono. 1994. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.